

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Dengan perkembangan dunia yang semakin global saat ini penulis merasa perlu mengetengahkan judul di atas yang berupa jabaran dari suatu fenomena tentang negara bangsa serta dampaknya bagi dunia internasional dipandang dari arti hubungan antar negara.

Alasan lainnya yaitu penulis berkeinginan untuk menganalisa tindakan suatu negara bangsa dalam mengambil kebijakan luar negerinya yang berorientasi pada tercapainya kepentingan nasional negara tersebut. Penulis mengambil judul di atas agar memberikan gambaran mengenai sikap atau tindakan suatu bangsa yaitu Amerika dalam mengambil suatu kebijakan luar negeri dan bagaimana menjalankan kebijakan tersebut, yang nantinya akan memberikan pengaruh bagi negara bangsa lain yang menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Amerika tersebut.

Sebagaimana diketahui Amerika adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem ini diambil oleh AS sebagai ungkapan politis dari penekanan pada hidup kemasyarakatan yang atomistik, AS mengambil komitmen pada prinsip demokrasi sebagai konsekuensi logis suatu Revolusi.<sup>1</sup>

AS menginginkan adanya pemerintahan yang sangat menghargai kebebasan

---

<sup>1</sup> Dedy N. Cahya, *AS: 175 Tahun Kemerdekaan dan Perubahan*, Gadis Media Universitas

dan pemenuhan kepentingan individu-individunya, dengan adanya jaminan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia). Sehingga dalam menentukan suatu kebijakan maka AS sangat menjunjung demokrasi yang juga merupakan kepentingan nasionalnya.

### **B. Latar Belakang Masalah**

Setiap negara berupaya untuk menjadi bagian dari fenomena perpolitikan dunia, hal ini ditegaskan dengan bagaimana posisi suatu negara tersebut dalam proses politik dan kemajuan ekonomi serta militer negara tersebut. Amerika sebagai negara *Major Power* selalu berusaha untuk menjalankan politik luar negerinya agar dapat mewujudkan kepentingan nasionalnya, Amerika juga tidak akan membiarkan ada kekuatan lain yang akan menyainginya sebagai negara *Major Power* begitupun di Asia. Amerika juga menyadari negaranya merupakan bagian dari pasifik, bahkan sering disebut sebagai polisi di wilayah ini.

Asia Timur agaknya menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Amerika karena di wilayah ini terdapat sebuah negara yang dapat dikatakan sebagai kekuatan baru di Asia yaitu China. China merupakan negara besar dengan penduduk terbanyak di dunia dengan ideologi sosialis dan menerapkan paham kapitalis dalam perekonomian dan perdagangan. Jadi China merupakan negara komunis terbesar setelah runtuhnya Soviet komunis yang dapat menjadi ancaman besar bagi Amerika di Asia Timur.



adalah kebijakan diplomasi, ekonomi dan militer dengan fokusnya pada aspek keamanan, terutama dalam hal keamanan internasional.<sup>4</sup>

China (Tiongkok) sendiri merupakan satu dari lima negara pendiri PBB(1945) dan sekaligus menjadi anggota Dewan Keamanan PBB yang ditandai dengan adanya Konferensi Dumbarton Oaks yang diselenggarakan dalam dua tahap; Tahap pertama dilaksanakan dari tanggal 21 Agustus-28 September 1944 yang dihadiri oleh Inggris, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Tahap kedua diselenggarakan mulai tanggal 29 September-7 Oktober 1944 yang dihadiri oleh Inggris, Uni Soviet dan China Tiongkok. Dalam Konferensi Dumbarton Oaks ini disepakati bahwa negara-negara yang berhak menjadi Dewan Keamanan yaitu, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Uni Soviet dan Tiongkok.<sup>5</sup>

Sejak pecahnya negara China tahun 1949 menjadi dua yaitu; RRC (China komunis daratan) dan China Nasionalis (Taiwan), keduanya mengklaim sebagai wakil sah bangsa China. Awalnya kebanyakan negara-negara di dunia hanya mengakui Republik China (Taiwan) dan Taiwanlah yang duduk di Dewan Keamanan PBB. RRC yang besar justru terisolasi dan hanya diakui oleh negara komunis.<sup>6</sup> Kemudian pada sidang umum PBB bulan Oktober 1971, RRC diakui oleh PBB sebagai negara yang sah berkuasa di China dan berhak atas kedaulatan China di Dewan Keamanan

---

<sup>4</sup> David J.Kaufman, Jeffrey S. Mckitrick, Thomas J. Leney, *US National Security, A Framework for Analysis* (Lexington, Massachusetts D.C Heath and Company,1985), hal.5

<sup>5</sup> Hand Book mata kuliah Organisasi internasional, disusun oleh Husni Amriyanto, *BAB II Posisi Strategis Dewan Keamanan di PBB.2001.*

<sup>6</sup> ...

PPB. Pada tahun 1992 PBB kemudian membuat Konsensus Satu China yang ditetapkan tanggal 28-29 Oktober 1992.<sup>7</sup> Dalam kebijakan "Satu China" PBB menunjuk RRC menjadi wakil sah bangsa China dalam perpolitikan dunia, dan negara-negara dunia harus memutuskan hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan.

Masalah Taiwan muncul dan mulai menjadi isu politik Cina setelah berdirinya RRC 1 Oktober 1949, menyusul tersingkirnya KMT ke pulau Taiwan. Dalam kata sambutan ketika memproklamirkan berdirinya RRC, Mao Zedong dengan tegas menyatakan bahwa "pemerintah pusat RRC adalah pemerintah yang sah, yang mewakili seluruh China". Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh wakil China di PBB yang menyatakan "Taiwan adalah bagian dari daratan China dan keputusan ini tidak akan berubah untuk selamanya".<sup>8</sup>

Keadaan itu sendiri akhirnya memunculkan kondisi "dua China", dimana keduanya (RRC dan RC/Republik China) saling mengklaim bahwa mereka mewakili pemerintah China. Kondisi dua China ini didukung oleh pemerintah AS yang mengakui Republik China di Taiwan sebagai satu-satunya pemerintah yang sah mewakili seluruh China (1952). Pengakuan oleh AS itu berkaitan dengan perang Korea (Juli 1950) yang telah melibatkan sukarelawan RRC yang membantu Korea Utara dan tentara AS yang berada di bawah panji-panji PBB membantu Korea Selatan. Mati dan cacatnya ribuan tentara AS di medan pertempuran itu mengakibatkan

---

<sup>7</sup> *China Unifications*, dalam <http://cns.Miss.Edu/straittalk/05%intro.htm>, diakses tgl 24 November 2005.

<sup>8</sup> D. Sidi Zuhri, *Legal Politik Demokrasi dan Politik Luar Negeri*, No. 1, 1999, hal. 70.

timbulnya perasaan anti China pada umumnya, dan Cina RRC pada khususnya. Buntut dari peristiwa tersebut, AS mulai melindungi pemerintah Nasionalis (KMT) di Taiwan. Dan melengkapinya dengan *mutual defense treaty* (1954) yang ditandatangani oleh pemerintah AS dan pemerintah Taiwan. Selain itu, AS melengkapinya dengan menghadirkan armada VII yang dimaksudkan untuk mencegah serangan RRC terhadap Taiwan. Namun tekad RRC membebaskan Taiwan tidak dapat dihalangi hanya dengan penempatan Armada VII AS. Menurut Chou Enlai, "Meskipun terdapat pemindahan militer AS ke wilayah tersebut, China tidak akan menarik kembali keinginannya untuk membebaskan Taiwan". Keinginan itu juga selaras dengan isi dari pembukaan Konstitusi RRC alinea 7, yang menegaskan "Taiwan adalah wilayah China, kami menentekkan untuk membebaskan Taiwan dan menyelesaikan masalah besar penyatuan tanah air kami".<sup>9</sup>

Sepereti diketahui, pengakuan pemerintah AS terhadap pemerintah Nasionalis sebagai pemerintah yang sah mewakili seluruh China ini berakhir setelah terjadinya perubahan dasar *detente* AS-RRC (1970) dan disetujui oleh keputusan Presiden Carter untuk membuka hubungan diplomatik dengan RRC 1 Januari 1979. Sikap AS yang mendua mulai nampak ketika akan meninggalkan ikatan tradisionalnya dengan negeri pulau ini yang menurut pemimpin-pemimpin Washington, Taiwan tidak

secara militer. AS menghadapi pilihan yang dilematis, di satu pihak harus mempertimbangkan kepentingan globalnya untuk menghadapi Uni Soviet dan untuk ini Washington harus menormalisasi hubungannya dengan Beijing. Di pihak lain, meninggalkan Taiwan setelah lebih dari dua dasawarsa menjalin persahabatannya, akan mendorong Taiwan untuk mencari "penjamin" baru bagi keamanan negerinya.

Untuk memperjelas permasalahan Taiwan dalam normalisasi yang bersejarah itu, seorang sinolog kelahiran Taiwan, Parris Chang berpendapat bahwa pengakuan penuh harus diberikan kepada RRC, dan memutuskan pengakuan diplomatiiknya terhadap Taiwan. Pendapat tersebut kemudian dikenal dengan "Formula Amerika" itu mengusulkan pula agar AS menyokong pulau itu untuk memproklamirkan berdirinya "Republik Taiwan" dan bukan Republik China. Apa yang dilakukan AS kemudian adalah "usaha mundur tanpa kehilangan muka" dengan menghapuskan kesan berkhianat terhadap sekutunya di pulau Taiwan. Untuk itu AS menjual senjata FX ke Taiwan, disamping perlengkapan militer lainnya seperti F-4, F-16, F-18 dan F5E yang diproduksi secara beresam AS-Taiwan.<sup>10</sup>

Dalam komunike Shanghai (1972) dan persetujuan AS atas Kebijakan Satu China (1979), AS mengakui pemerintah RRC adalah pemerintah yang sah bagi China, dan Taiwan adalah bagian dari China. Sedangkan RRC telah menerima pernyataan sepihak AS yang

---

<sup>10</sup> James M. Wilson, *The Sale of FX Weapons to Taiwan: The Deng Generation*, Santa Monica

mengharapkan agar penyelesaian masalah Taiwan diselesaikan secara damai. Dengan kompromi terbatas itu, AS meneruskan kebijakan menjual senjata defensif kepada Taiwan, seiring dengan berakhirnya pakta pertahanan bersama (AS-Taiwan) 1 Januari 1980. Masalah penjualan senjata itu membuat pemerintah RRC marah dan mengatakan bahwa tindakan AS tersebut berarti Washington masih tetap mengakui "dua China". Tindakan AS itu juga dinilai tidak menghormati kedaulatan RRC.

Tahun 1981 Haig yang berkunjung ke Beijing menyampaikan bahwa pemerintah Reagent sekarang ini menekankan pentingnya strategi dalam hubungan AS-RRC dan memutuskan untuk menjual senjata ke China. Bersamaan dengan itu pada Desember 1981, Washington mengumumkan bahwa pemerintahnya menyetujui penjualan perlengkapan militer dalam skala besar ke Taiwan. Pada awal 1982, pembantu Menlu John H. Holdridge memberitahu Beijing bahwa pemerintahnya tidak menjual lagi FX ke Taiwan, tapi tetap meneruskan produksi bersama F5E yang berada di Taiwan.<sup>11</sup>

Sementara itu juru bicara kedutaan China di Washington, Sun Weide mengatakan: Beijing sangat serius melihat langkah-langkah AS terhadap Taiwan, terutama penjualan senjata ke negara pulau itu. "Situasinya makin kritis, karena itu kami mendesak AS untuk menghentikan penjualan senjata ke Taiwan dan memutuskan hubungan militer antara AS-Taiwan". AS sampai saat ini masih memimpin dalam

penjualan senjata ke Taiwan padahal pada 1979 AS mengakui perubahan status diplomatik dari Taipei ke Beijing.<sup>12</sup>

Isu Taiwan merupakan masalah yang paling sensitif dalam hubungan China-AS. Perdana Menteri China, Wen Jiabao menegaskan bahwa untuk mengembangkan hubungan China-AS berkembang baik, kedua belah pihak harus mengendalikan masalah ini dengan baik. Beliau berpendapat bahwa bagi sebuah negara, mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayahnya merupakan kepentingan negara tertinggi dan prinsip yang mesti dijalankan.<sup>13</sup>

Taiwan dan China yang terpisah pada tahun 1949 setelah perang saudara, secara teknis masih berperang meskipun ada kesepakatan damai pada akhir tahun 1980-an. Sebagai penjelasan atas prinsip "Satu China" Beijing mendefinisikan Taiwan sebagai bagian dari China yang menunggu proses reunifikasi.<sup>14</sup> Sehingga China berharap agar Amerika dapat menghargai kesepakatan satu china yang telah disetujui bersama.

### **C. Pokok Permasalahan**

Permasalahan yang diambil dari latar belakang masalah di atas adalah: **"Mengapa Amerika tetap memasok senjata kepada Taiwan setelah menyetujui kebijakan satu China ?"**

---

<sup>12</sup> *Posisi Penjualan senjata AS ke Taiwan*, dalam [http://www.suara-pembaruan.com/News/2004/07/14/internas/int\\_03.htm](http://www.suara-pembaruan.com/News/2004/07/14/internas/int_03.htm). diakses tgl 4 Juli 2005.

<sup>13</sup> *Reunifikasi RRC-Taiwan Dengan Jalan Damai*, dalam <http://my.chinabroadcast.cn/1/2002/12/10/2002121002005.htm> diakses tgl 4 Juli 2005.

## D. Kerangka Pemikiran

### Teori Model Aktor Rasional.

Pengambilan keputusan dengan model aktor rasional ini sangat tepat digunakan sebagai kerangka untuk menganalisa permasalahan pada pokok permasalahan di atas sehingga dapat dihasilkan penjelasan logis dalam fenomena yang menjadi latar belakang permasalahan tersebut. Model ini juga sangat menekankan pada kepentingan nasional suatu bangsa dalam membuat kebijakan luar negeri suatu negara.

Model Aktor Rasional dalam pengambilan keputusan dapat diartikan bahwa;

*Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai tindakan aktor rasional terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini individu melalui serangkaian tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan penalaran yang sungguh-sungguh berusaha menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada. Jadi unit analisa model ini pembuatan keputusan ini adalah pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh pemerintahnya, dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif itu.<sup>15</sup>*

AS menghadapi pilihan yang dilematis, di satu pihak harus mempertimbangkan kepentingan globalnya untuk menghadapi Uni Soviet dan untuk ini Washington harus menormalisir hubungannya dengan Beijing. Di pihak lain, meninggalkan Taiwan setelah lebih dari dua

dasawarsa menjalin persahabatannya, akan mendorong Taiwan untuk mencari "penjamin" baru bagi keamanan negerinya.

Berkaitan dengan alternatif pilihan tersebut, maka AS mengambil kebijakan oleh aktor rasionalnya, dengan mengambil tindakan "Politik Pembendungan (*Containment Policy*)".

*Containment Policy* menurut Jack C. Plano:

"Dasar kebijakan politik luar negeri perang dingin AS dan asumsi teoritisnya, dimaksudkan untuk menghentikan ekspansi US. Teori pembendungan berpangkal dari asumsi bahwa kebijakan luar negeri US sangat dilandasi oleh tuntutan kediktatoran yang didasarkan pada ideologi komunis serta sejarah Rusia.....

*Signifikasi* : Kebijaksanaan secara tidak langsung menunjukkan tindakan yang didasarkan pada teori politik luar negeri yang realistik, berjangka panjang dan dikembangkan dengan baik, dengan demikian kebijaksanaan ini bukan merupakan kumpulan prinsip ideal abstrak yang berkembang secara historis sebagai pemandu kebijaksanaan luar negeri AS. Pembendungan seperti dispostulasikan oleh Kennan, memerlukan saraf baja, kepekaan mengenai waktu, dan sentuhan lembut. Melalui cara ini US tidak akan terpojokan sehingga tidak merasa dipaksa atau berpaling dan melakukan perang. Melalui strategi pembendungan terbuka pintu bagi US untuk melakukan *manuver* dan tidak merasa dipermalukan. Tujuan akhir pembendungan bukan perang tetapi pengakomodasian. Akibatnya kebijaksanaan pembendungan menyebabkan terindinya kehutanan militer

yang diikuti oleh meredanya ketegangan dan terbentuknya tindakan akomodatif. Doktrin pembendungan juga ditujukan untuk menangkalkan ekspansi China di Asia".<sup>16</sup>

*Containment* di Asia Timur awalnya ditujukan untuk ekspansi dua negara komunis (koalisi Soviet dan RRC) ke negara-negara tetangganya. Di Eropa, dilakukan dengan kerangka multilateral NATO. Di kawasan Asia Pasifik, AS terutama memperkuat kerjasama keamanan atau perjanjian-perjanjian yang bersifat bilateral dengan negara-negara di kawasan ini: AS diibaratkan dengan "tangan dengan lima jari". Yakni: Jepang (1951), Australia New Zeland(1951), Taiwan(1954), Korea Selatan(1954), *Manila Treaty* (Philipina dan Thailand), yang kemudian menjadi dasar pembentukan SEATO (*Shoutheast Asia Treaty Organization*, 1954). Kondisi *Containment* AS terhadap RRC berkembang bukan hanya pada pembendungan "Komunisme", namun AS juga membendung RRC dengan melihat perkembangan politik, ekonomi, militer dan keadaan geografis RRC yang dianggap sebagai ancaman bagi Asia. Bahkan pandangan kaum Neo-konservatif di AS mengatakan "jangan membuang waktu untuk membendung RRC menjadi besar, segeralah memulai perang dingin dengan RRC".

Kebijakan *containment* terhadap RRC meliputi: embargo senjata, membantu kemampuan militer lawan (Taiwan) untuk mengimbangi kekuatan militer RRC dan mempertahankan hubungan baik dengan

---

<sup>16</sup> Jack C. Blau & Ben Olin, *The International Relations Dictionary*, Holt, Rinehart & Winston

Jepang.<sup>17</sup> Untuk itu tetap memasok senjata kepada Taiwan merupakan bagian dari *Containment Policy* AS untuk membendung kekuatan China di Asia Timur.

### **Konsep Kepentingan Nasional**

Konsep ini sangat mendukung dalam menjelaskan teori di atas, Morgenthau menyatakan bahwa perilaku negara dalam hubungan internasional dituntun oleh pengejaran kepentingan nasional, dan kepentingan nasional itu adalah:

*Memperoleh, mempertahankan atau memperbesar kekuatan negara.*<sup>18</sup>

Arti minimum *inheren* dalam konsep kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup (*survival*). Dalam pandangan Morgenthau, kemampuan minimum negara-bangsa adalah melindungi identitas fisik; politik dan budayanya dari gangguan negara bangsa lain. Lebih spesifik negara bangsa harus bisa mempertahankan integritas teritorialnya:

- mempertahankan rezim ekonomi-politik (identitas politiknya) yang mungkin saja demokratis, otoriter, sosialis atau komunis dan sebagainya
- memelihara norma-norma etnis, religius, linguistik dan sejarahnya (identitas budayanya)

---

<sup>17</sup> Diktat mata kuliah Hubungan Internasional Kawasan, oleh Ali Muhammad,

<sup>18</sup> *ibid.*

Menurut Morgenthau dari tujuan-tujuan umum ini para pemimpin suatu negara bisa menurunkan kebijaksanaan-kebijaksanaan spesifik terhadap negara lain, baik yang bersifat kerjasama maupun konflik. Misalnya, perlombaan senjata, perimbangan kekuatan, pemberian bantuan asing, pembentukan aliansi, atau perang ekonomi dan propaganda.

Konsep kepentingan Nasional (*national interest*) merupakan suatu konsep yang mempengaruhi segala kebijakan politik luar negeri suatu negara, konsep ini adalah konsep populer dalam analisa hubungan internasional baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, meramalkan maupun menganjurkan perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional sering digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan politik luar negeri suatu negara. Konsep ini juga sering dipakai sebagai pengukur keberhasilan politik luar negeri suatu negara.<sup>19</sup>

Kebanyakan propaganda yang bersumber dari Beijing mempunyai tema simple: "Partai Komunis adalah RRC, mencintai partai adalah mencintai negara". Para pemimpin RRC menyalakan api nasionalisme, dengan setiap kali membangkitkan "Kesadaran Penderitaan". Pesannya ialah bahwa: "teriakan-teriakan untuk demokrasi dan hak-hak asasi manusia akan membawa perpecahan dan kekacauan yang akan membukakan pintu agresi dari luar dan penghinaan-penghinaan baru".<sup>20</sup>

Sesuai dengan konsep kepentingan nasional maka, Kebijakan AS untuk tetap memasok senjata kepada Taiwan merupakan tindakan yang

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 68.

<sup>20</sup> A. Hassan Habib, *Strategi dalam Hubungan Internasional Studies/OSISI*, KADITA SELECTA

sangat rasional untuk menjaga kepentingan nasionalnya dari ancaman hegemoni lain yaitu kekuatan RRC di Asia Timur

Setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah baik berupa keputusan di dalam negeri maupun kebijakan luar negeri haruslah diambil secara rasional dengan mempertimbangkan untung-ruginya, dan tentu saja dengan prinsip dasar negara yaitu pemenuhan kepentingan nasional. Dengan teori di atas serta didukung dengan konsep yang menunjang maka akan dapat dijadikan kerangka pemikiran dalam menganalisa permasalahan dari judul di atas.

#### **E. Hipotesa**

Amerika Serikat tetap memasok senjata kepada Taiwan setelah menyetujui kebijakan "Satu China" dengan tujuan membendung kekuatan RRC di Asia. Keputusan ini diambil secara rasional oleh AS dengan pertimbangan yang bertumpu pada kepentingan nasionalnya.

#### **F. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan skripsi yang penulis ingin capai dan harapkan meliputi beberapa hal yang sesuai dengan perkembangan, antara lain:

1. Melihat perkembangan hubungan luar negeri AS dengan kedua negara yang sedang mengalami suatu masalah

2. Mempelajari politik luar negeri suatu negara dalam memberikan pengaruh kepada negara lain, dalam kerangka pemenuhan kepentingan nasional negara tersebut.
3. Mengetahui potensi suatu negara dalam menjaga keamanan internasional di kawasan Asia Timur.

### **G. Metode Penyusunan**

Dalam penulisan, penulis akan menerapkan metode analisa guna menganalisa terhadap bagian-bagian dari penulisan ini yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penulisan yang sesuai. Tujuan akhir dari metode analisa penulis yaitu untuk menerapkan konsep Deskriptif, Eksplanatif dan Prediktif. Hal ini di tujukan untuk menjawab fenomena yang ada dari judul penulisan dan permasalahan yang diambil dalam tulisan.

Penulis juga akan mengikuti perkembangan dari prediksi para ilmuwan Hubungan Internasional guna menyamakan persepsi dan berusaha untuk melihat lebih jauh kebijakan luar negeri AS terhadap Taiwan. Sehingga fakta-fakta yang diperoleh akan dapat dipadukan dengan teori-teori ilmuwan hubungan internasional, dan akan dihasilkan suatu analisa yang sistematis.

### **H. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang penulis gunakan dalam proscs pengumpulan data yaitu melalui studi pustaka dengan memaparkan literatur dan konsep

yang sesuai dengan judul yang penulis ambil dan kemudian dijabarkan secara rinci dan luas guna mendapatkan hasil yang akurat dan *up to date*. Selain membaca literatur buku teknik studi pustaka tersebut juga dilengkapi dengan memantau perkembangan dunia khususnya negara AS dalam menyikapi konflik China-Taiwan melalui media massa baik cetak maupun elektronik, juga *browsing* internet.

### **I. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian yang akan membatasi dan menyederhanakan masalah yang sesuai dengan judul dan permasalahan yang diambil dalam penulisan akan dimulai sejak Era Paska Perang Dunia II sampai pada tahun 2005. Sehingga dapat menjadi tulisan yang efisien namun tetap aktual.

### **J. Sistematika Penulisan**

Dalam sebuah penelitian pasti memerlukan sistematika agar dapat dihasilkan suatu tulisan yang baik, akurat sesuai dengan kenyataan yang ada. Rencana sistematika penulisan tersebut yaitu dengan sistem penulisan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang digabungkan secara bersama-sama dan meliputi uraian sebagai berikut yaitu

BAB I: Berisi tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pokok permasalahan yang diambil, kerangka penulisan skripsi

rangkuman dari latar belakang masalah dan menjadi jawaban sementara dari permasalahan, tujuan penulisan skripsi yang merupakan syarat untuk mencapai gelar S1 jurusan Hubungan Internasional, metode penyusunan skripsi, teknik pengumpulan data, sistematika penulisan yang sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

BAB II: Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai hubungan militer antara AS-China paska Perang Dunia II, normalisasi hubungan AS-China, masalah Taiwan dalam Hubungan AS-RRC dan fakta mengenai China sebagai ancaman di Asia.

BAB III: Dalam bab ini akan dibahas mengenai: hubungan AS-Taiwan (perjanjian yang mendukung), perbandingan militer antara RRC-Taiwan dan kerjasama militer Amerika Serikat dan Taiwan.

BAB IV: Dalam bab ini akan memaparkan mengenai kepentingan nasional AS ke Taiwan, rasionalitas kebijakan Amerika Serikat terhadap RRC (*Containment Policy*) dan reaksi RRC tentang kebijakan Amerika Serikat dalam isu Taiwan.

BAB V: Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang  
ditarik dari pembahasan dari Bab III dan Bab IV